

Bias Politik Pesantren: Dari Pragmatisme-Transaksional Hingga Resistensi Sosial

<http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2011.0005>

Saidin Ernas

Program Studi Filsafat IAIN Ambon, Maluku. *Email:*
ernassaid@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays more and more out of boarding school as a primary function of Islamic educational institutions and engage in practical politics. An action that causes a variety of social and political implications that ought to be observed scientifically. This paper describes an important finding that successful boarding school involvement in politics, despite the economic added-value material that benefit schools, but it has grown factual in-transactional pragmatic political behavior and at the same time reduce the legitimacy of public schools and cause resistance to the political attitudes of pesantren

Keywords: Political of boarding School (Pesantren), Pragmatism -Transactional, Social Resistant

ABSTRAK

Dewasa ini semakin banyak pondok pesantren yang keluar dari fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan Islam dan melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Sebuah tindakan yang menimbulkan berbagai implikasi social maupun politik yang patut untuk dicermati secara ilmiah. Tulisan ini berhasil mendeskripsikan temuan penting bahwa keterlibatan pesantren dalam politik, meskipun memberi nilai tambah ekonomi-material yang menguntungkan pesantren, namun secara factual pada telah menumbuhkan perilaku politik pragmatis-transaksional dan pada saat yang sama menurunkan legitimasi pesantren dan menimbulkan resistensi masyarakat terhadap sikap politik pesantren.

Kata Kunci: Politik Pesantren, Pragmatisme-Transaksional, Resisten Sosial

PENDAHULUAN

Meskipun selama ini sudah banyak peneliti yang menjadikan pesantren sebagai objek kajian, namun selalu saja tersedia perspektif tertentu yang belum bisa diungkap¹. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki kekayaan khasanah pengetahuan sosial yang dapat diteliti dari berbagai aspek keilmuan. Posisi pesantren yang demikian itu mempertegas sebuah hipotesa bahwa pesantren bukan hanya sebuah lembaga pendidikan Islam semata, tetapi juga telah menjadi entitas politik yang berpengaruh di Indonesia. Atau dalam kata-kata Eric Hiariiej dari Fisip UGM, *pesantren is more politics than we think*.

Perdebatan tentang keterlibatan pesantren dalam politik selalu berada dalam tarik menarik dua kutup pendapat yang kontradiktif. Yakni antara pendapat yang mengabsahkan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar, serta pendapat yang mengkritiknya dengan keras sebagai pengingkaran terhadap fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, yang seharusnya selalu menjaga independensi dan posisi politik. Pendapat yang *pertama*, mengasumsikan bahwa komunitas pesantren, bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lainnya. Hal ini didukung oleh argumentasi teologis yang membernakan pilihan politik praktis. Pendapat ini semakin kukuh apalagi didukung oleh realitas semakin banyaknya pemimpin pesantren (Kiai) yang terjun dalam dunia politik langsung maupun tidak. Pendapat *kedua* mengkritik dengan keras, bahwa keterlibatan pesantren dalam dunia politik lebih banyak bahaya daripada manfaatnya (Khoirudin, 2005; ix-x). Hal ini mengacu pada realitas politik kekinian yang sering dianggap “kotor, maka keterlibatan pesantren dalam dunia politik bagaimanapun baik dan kokohnya landasan serta argumentasi teologisnya, akan ikut terseret kedalam dunia yang “kotor” pula.

Perdebatan seperti ini memang tidak akan pernah selesai, sebab masing-masing akan menunjukkan berbagai argumentasi etis maupun praksis untuk mendukung pendapatnya. Di dalam tulisan ini kedua pendapat tersebut akan diletakkan sebagai dasar pijak untuk mencermati lebih jauh bagaimana praktik politik pesantren dan menganalisis implikasinya secara berimbang, baik terhadap eksistensi pesantren maupun terhadap

komunitasnya. Untuk kepentingan analisis tulisan ini mengambil contoh praktik politik di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

KERANGKA TEORITIK

Secara historis fungsi dasar pesantren adalah sebagai lembaga pendidikan Islam, namun pesantren juga memiliki pengaruh dan peran politik yang penting di tengah masyarakat tradisional (Khoirudin, 2005; ix-x). Oleh sebab itu pesantren sering berada dalam “pusaran arus” tarik-menarik kepentingan politik, sehingga tidak sedikit pesantren yang akhirnya melibatkan diri dalam politik. Tingkat intensitas dan bentuk keterlibatan pesantren dalam politik bisa bermacam-macam, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana kita saksikan pada pelaksanaan momen-momen politik yang penting, seperti Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Studi tentang pesantren merupakan bidang yang kompleks karena menuntut analisis yang cermat dari berbagai sudut pandang. Mengingat kompleksitas tersebut, maka kajian tentang keterlibatan pesantren dalam politik dan implikasi yang ditimbulkannya tidak cukup hanya menggunakan satu teori atau sudut pandang tertentu. Guna mendapatkan kerangka pemahaman yang utuh maka penulis akan menggunakan tiga pendekatan teoritis sekaligus sebagai pisau analisis untuk menjelaskan masalah di atas, yakni teori tentang hubungan agama dan negara, teori tentang ekonomi politik dan teori hegemoni politik. Berikut akan dijelaskan aspek-aspek signifikan dan hubungan antara ketiga teori tersebut dengan penelitian ini.

Dalam tulisannya tentang usaha pencarian konsep negara dalam sejarah pemikiran politik Islam, Din Syamsuddin (1993), merumuskan empat paradigma tentang hubungan agama dan negara (politik) dalam pemikiran dalam politik Islam. Paradigma yang *pertama*, dikenal dengan paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*scheiding van kerk en staat*) karena apa yang merupakan wilayah agama, juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. *Kedua*, paradigma sekularistik yang mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, pandangan sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak

menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu negara. *Ketiga*, paradigma yang mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Jika dikaitkan dengan sistem politik di Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa Indonesia menganut aliran ini. Sebagaimana direfleksikan dari Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara hingga kehadiran Departemen Agama sebagai institusi yang mengurus agama. Dalam negara yang menganut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara (politik) merupakan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi, saling mengisi bahkan juga saling mengkooptasi (Bactiar Efendi, 1998). Maka dilihat dari sisi ini, perpolitikan di Indonesia membuka ruang partisipasi bagi kelompok keagamaan termasuk komunitas pesantren untuk terlibat dalam politik. Dalam konteks ini keterlibatan Pesantren dalam politik praktis harus dilihat sebagai partisipasi politik yang merupakan hak dan tanggungjawab semua warga negara.

Keterlibatan pesantren dalam politik juga juga mesti dilihat dalam kerangka ekonomi politik. Sebab dalam sistem politik liberal sebagaimana dianut di Indonesia, interaksi-interaksi politik tidak dapat diidentifikasi berdasarkan pemahaman keagamaan semata, karena juga berkaitan dengan tawar menawar (*bargaining*) kepentingan yang bersifat ekonomi. Hubungan sistematis dalam teori ekonomi politik sebagaimana digambarkan di atas dapat dilihat pada tiga kemungkinan. *Pertama*, terdapat hubungan kausalitas antar ekonomi dan politik yang dalam hal ini sering disebut model ekonomi politik *deterministic*. Model ini mengasumsikan bahwa ada hubungan *deterministic* antara ekonomi dan politik, dimana politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan institusi ekonomi menentukan proses-proses politik. *Kedua*, ada hubungan timbal-balik antarekonomi dan politik yang sering disebut model ekonomi *politic interaktif* yang menganggap fungsi-fungsi politik dan ekonomi berbeda, namun saling mempengaruhi satu dengan yang lain. *Ketiga*, terdapat hubungan perilaku yang berlanjut atau kontinyu (*a behavioral continuity*) antara ekonomi dan

politik (Staniland,2005; 9).

Kegiatan ekonomi, seperti juga kegiatan lain dalam masyarakat tidak terlepas dari konteks politik, karena sistem politik tidak hanya menentukan *power relation* dalam masyarakat tetapi juga menentukan nilai-nilai atau norma-norma yang sedikit banyak akan menentukan apa dan bagaimana, berbagai kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam masyarakat. Menurut Deliarnov (2005; 9), Teori ekonomi politik adalah sebuah perspektif analisis ekonomi terhadap proses politik yang didalamnya terdapat kajian tentang institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan keputusan ekonomi yang berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Di sini dibutuhkan analisis yang kritis, sebab posisi politik pesantren yang strategis, memberi peluang untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari proses-proses politik yang dimainkannya.

Sementara teori hegemoni perlu juga digunakan untuk menjelaskan posisi pesantren dengan politik. Sebab interaksi komunitas pesantren dengan politik dan kekuasaan sangat memungkinkan pesantren berada dalam posisi yang inferior dan terhegemoni oleh politik kekuasaan. Menurut Gramsci hegemoni adalah:

“.....the supremacy of a social group manifest itself in two ways, as “domination” and as “intellectual and moral leadership”. A social group dominates antagonistic groups, which it tends to ‘liquidate’ or to subjugate” (Patria, 2003).

Rumusan ini menunjukkan bahwa teori hegemoni memiliki dua konsep dasar yang penting, yaitu dominasi (*domination*) dan kepemimpinan politik (*intellectual and moral leadership*). Dengan kata lain hegemoni dijalankan dengan menguasai kepemimpinan politik dan memperkuat superioritas kelompok dominan. Disini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai. Dalam konteks keterlibatan pesantren dalam politik, posisi pesantren dikhawatirkan selalu berada dalam posisi yang terhegemoni. Sehingga pesantren hanya menjadi unsur subordinat dari politik sehingga bisa digiring pikiran, kemampuan kritis dan kemampuan-kemampuan afektifnya untuk mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan politik. Kelas dominan yang direpresentasikan

oleh kekuatan politik praktis dapat melakukan penguasaan kepada pesantren dengan menggunakan agama sebagai ideologi. Kekuatan politik praktis dapat merekayasa kesadaran komunitas pesantren sehingga dengan penuh kesadaran, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas politik yang dominan itu.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian *case study* yang melihat bias politik pesantren dari pragmatisme-transaksional hingga resistensi social studi kasus pada Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interview mendalam serta didukung oleh data sekunder terkait fokus dalam penelitian ini. Metode analisis data pada penelitian ini deskriptif analisis terhadap hasil temuan lapangan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, yang kemudian di perkuat dengan data-data sekunder yang terkait dengan kajian tersebut untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN ANALISIS

1. Pesantren Al-Munawwir dan Dusun Krapyak yang Sedang berubah.

Krapyak adalah sebuah dusun santri yang terletak pada tapal batas Kota Yogyakarta di Utara dan Kabupaten Bantul di Selatan, tepatnya di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Yogyakarta (RPP Desa Panggungharjo, 2009; 214). Sebelum Pondok Pesantren Al-Munawwir didirikan di Krapyak, daerah ini hanya sebuah dusun kecil yang dihuni oleh mayoritas penduduk jawa yang oleh Clifford Geertz disebut Islam Abangan (1989). Namun setelah Pesantren menjalankan aktifitasnya, syiar Islam mulai berkembang dan menjadikan masyarakat di dusun ini sebagai masyarakat religius. Beberapa Mahasiswa yang kuliah di UIN Kalijaga atau Universitas Gajah Mada, memilih untuk tinggal di sini sambil belajar agama di Pesantren Al-Munawwir pada pagi atau sore hari.

Pondok Pesantren Al-Munawwir terletak tepat di jantung dusun Krapyak dan menjadi pusat berbagai aktifitas sosial, ekonomi, politik dan keagamaan. Pesantren Al-Munawwir didirikan oleh KH. Moenawwir pada tanggal 15 Nopember 1910 M². Setelah ditinggal wafat oleh pendirinya

KH. Moenawwir, Pesantren Krapyak mengalami kemajuan yang pesat khususnya ketika dipimpin oleh KH. Ali Maksum. Pada masa beliau, Pesantren Krapyak menjadi tuan rumah Mukhtamar NU yang ke-28. Dan sebagaimana diketahui, dalam Mukhtamar tersebut NU berhasil merumuskan secara fundamental gagasan pokok tentang depolitisasi NU yakni kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi jam'iyah sebagaimana yang telah diputuskan pada Mukhtamar di Situbondo. Pelaksanaan Mukhtamar NU yang cukup penting ini, menunjukkan besarnya pengaruh dan eksistensi Pesantren Krapyak di bawah kepemimpinan KH. Ali Maksum di kalangan pesantren-pesantren NU lainnya.

Saat ini Pesantren Al-Munawwir dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Munawwir, salah seorang putra KH. M. Munawwir yang merintis Pesantren ini. Setelah 100 tahun berkiprah dalam pengajaran keagamaan, saat ini Pesantren Al-Munawwir telah berkembang pesat. Berbagai bangunan baru terus di bangun. Sementara tepat di jantung pesantren berdiri sebuah Masjid yang megah dan menjadi pusat kegiatan pesantren dan warga masyarakat sekitar. Seiring dengan perkembangan zaman dan proses perubahan sosial, Yayasan Pesantren Al-Munawwir telah mengembangkan berbagai lembaga pendidikan, termasuk pendidikan umum seperti SMK Teknik Mekanika serta unit kegiatan lainnya. Namun pesantren ini tetap setia pada ciri khas yang telah dibangun pendahulunya yaitu sebagai pesantren Salafy yang mengembangkan ilmu-ilmu Al-Qur'an.

Sementara itu masyarakat Krapyak yang selama ini hidup menyatu dengan dinamika pesantren juga semakin maju, mengikuti derap kemajuan yang terjadi di Yogyakarta. Masyarakat masih tetap melihat pesantren Al-Munawwir sebagai institusi pendidikan keislaman yang penting dan dihormati, mereka mengaku masih tetap menghormati para Kiai dan pengasuh pesantren. Namun masyarakat tidak serta merta setuju dengan orientasi politik yang dipilih pesantren. Bila sebelumnya pilihan politik masyarakat selalu paralel dengan pilihan politik pesantren sebagaimana tercermin pada pemilu 1999 dan 2004, dimana masyarakat turut memenangkan PKB di wilayah Krapyak dan berhasil memberikan hadiah 1 kursi di DPRD Propinsi Yogyakarta untuk Nyai Ida Zainal (Istri KH. Zainal Abidin Munawwir). Kini terjadi perubahan signifikan, mereka menganggap pilihan politik pada partai tertentu tidak mesti sama dengan

orientasi politik pesantren Al-Munawwir (Wawancara dengan Bapak Hunain, 5 Oktober 2010). Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang didukung penuh oleh pesantren pada Pemilu 2009, ternyata kalah telak oleh partai nasionalis seperti PDIP, Golkar dan Demokrat. Kemenangan PDIP merupakan pukulan politik bagi komunitas pesantren Krpyak karena memperlihatkan pengaruh pesantren yang makin memudar di bidang politik.

2. Praktik Politik Pesantren; Dinamika di Pesantren Al-Munawwir pada Pemilu 2009

Bolland (1982) dalam *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, mengatakan bahwa ketertarikan umat Islam kepada partai politik bukan saja disebabkan oleh kemampuan partai politik memperjuangkan dan membela kepentingan Islam, tetapi lebih pada adanya tipologi umat Islam dalam memandang hubungan politik dengan Islam. Terdapat tiga tipologi dalam berpolitik ketika diperhadapkan dengan Islam; tipologi ideologis, tipologi kharismatik, dan tipologi rasional.

Dalam tipologi ideologis, umat Islam memposisikan berpolitik sama dengan beragama Islam. Sehingga semangat pembelaan politik sama dengan semangat membela dan memiliki Islam. Memiliki sebuah partai politik sama dengan memilih agama Islam, dan seterusnya ketaatan dalam politik sama dengan ketaatan menjalankan ajaran Islam. Sedangkan tipologi Kharismatis mengasumsikan bahwa umat Islam memilih sebuah partai politik mengikuti sikap dan perilaku seseorang yang dikagumi di sekitarnya. Apa yang dikatakan dan dilakukan figur selalu menjadi rujukan masyarakat. Akibat kekaguman yang berlebihan umat Islam sering tidak mampu bersikap dan berpikir rasional. Dalam tipologi rasional, kemampuan umat Islam dalam memilih partai politik (sikap politik) benar-benar didasarkan pada pandangan rasional. Memilih atau tidak memilih partai politik tertentu dilihat dari kemampuan partai politik menawarkan program yang dapat memperbaiki atau memperjuangkan nasib rakyat

Menurut Koirudin (2005), saat ini mayoritas umat Islam masih menempati posisi tipologi pertama dan kedua, ketimbang pada posisi tipologi yang ketiga. Maka ketika umat Islam memandang bahwa berpolitik sama dengan beragama Islam, maka karakter ini akan mendorong

munculnya tokoh-tokoh agama sebagai tokoh politik. Persoalan-persoalan umat yang bersinggungan dengan kepentingan politik tidak lagi ditangani oleh politisi profesional, tetapi diambil alih oleh kiai dan tokoh-tokoh pesantren yang merasa memiliki pengaruh dan otoritas keagamaan lebih besar atas umat yang dipimpinnya.

Dengan demikian keterlibatan pesantren dalam politik sesungguhnya membuktikan pandangan di atas. Setiap pesantren dan Kiai memiliki cara tersendiri sesuai dengan sejarah pesantren, spektrum pengaruh pesantren di tengah masyarakat, potensi peluang politik yang dimiliki serta seberapa besar tarikan politik eksternal yang mereka alami. Untuk mendapatkan gambaran proses tersebut, maka pada bagian berikut akan dijelaskan tentang proses-proses politik yang melibatkan pesantren dengan mengambil penggambaran dari proses politik yang terjadi di Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Secara historis, Pesantren Al-Munawwir Krapyak adalah sebuah pesantren NU yang besar dan berpengaruh di Yogyakarta. Sejak dipimpin oleh pendirinya KH. Munawwir hingga menantunya KH. Ali Maksum, pesantren ini benar-benar berkembang pesat dan memiliki pengaruh yang kuat. Dua tokoh tersebut memiliki spektrum pengaruh yang besar dan meluas hingga ke tingkat nasional. Tidak mengherankan bila apapun yang difatwakan menjadi pegangan santri dan masyarakat, termasuk dalam urusan politik. Namun setelah ditinggal KH Ali Maksum, Pesantren Al-Munawwir mulai mengalami guncangan dan fragmentasi internal dan berkembang menjadi beberapa yayasan yang terpisah pengelolaannya. Yayasan Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak yang saat ini dipimpin oleh KH. Zanal Abidin Munawwir dan Yayasan Ali Maksum yang dipimpin oleh KH. Attabiq Ali. Sementara itu dalam Pesantren Al-Munawwir sendiri terdiri dari beberapa unit pendidikan yang pengelolaannya diserahkan secara otonom kepada beberapa keluarga Bani Munawwir. Dengan demikian aktor politik di Pesantren Al-Munawwir, tidak bisa lagi dilekatkan pada Kiai Zainal Munawwir semata.

Dinamika internal ini mengakibatkan fragmentasi sikap politik Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang terbelah dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009. Secara garis politik Pesantren Al-Munawwir adalah pesantren NU yang ikut melahirkan Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB). Pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, komunitas pesantren secara penuh mendukung PKB. Sehingga partai politik milik warga NU itu berhasil mengumpulkan suara yang signifikan di wilayah Krapyak. Namun perpecahan yang dialami PKB pada beberapa tahun lalu, mendorong sebagian tokoh di pesantren Krapyak ikut menyokong pembentukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang inisiasi pendiriannya dipelopori oleh komunitas Kiai NU yang kecewa dengan sikap Gus Dur (Wawancara dengan KH. Zainal Abidin Munawwir, 7 Oktober 2010).

Pada Pemilu legislatif dan Pemilu presiden 2009, sikap politik pesantren Krapyak terbelah pada beberapa partai politik yang dapat digambarkan sebagai berikut. *Pertama*, kelompok yang mendukung Partai PKNU yang disebut sebagai Partai Ulama setelah PKB dilanda perpecahan eksternal dan dianggap tidak mampu memperjuangkan visi pesantren dan ulama. Pendukung PKNU adalah Yayasan Pesantren Al-Munawwir yang dipimpin oleh KH. Zainal Abidin Munawwir. Bahkan Nyai Ida Fatimah Zainal (Istri Kiai Zainal Abidin Munawwir yang memimpin pesantren Putri) juga terlibat sebagai calon legislatif untuk DPRD Yogyakarta dari PKNU. *Kedua*, Kelompok yang mendukung Partai Demokrat yang dalam hal ini dipelopori oleh Yayasan Ali Maksud yang dipimpin oleh KH. Attabiq Ali. Hal ini bisa dimengerti sebab KH. Attabiq Ali adalah mertua dari Anas Urbaningrum, politisi Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. *Ketiga*, adalah kelompok yang tidak memiliki afiliasi politik yang jelas, termasuk kelompok ini adalah KH. Ahmad Warsum Munawwir yang memimpin Pondok Pesantren Krapyak di Blok L.

Hasil Pemilu legislatif 2009 di Desa Panggungharjo untuk DPRD Propinsi dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memperoleh 5220. Diikuti oleh Partai Demokrat diposisi kedua dengan 4147 suara. Partai Golkar memperoleh 2263 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 1644 suara. Sedangkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama yang mencalon Hj. Ida Fatimah, S.Ag, M.si (Istri KH Zainal Abidin Munawwir) hanya memperoleh 1295 suara.

TABEL 1. REKAPITALASI JUMLAH SUARA, 56 TPS DI DESA PANGGUNG HARJO

No	Partai	Suara Sah 19.181	
		Jumlah Suara Partai	Persentase(%)
1	PDIP	5220	27
2	Demokrat	4147	21
3	Golkar	2263	11,7
4	PKB	1644	8,5
5	PKNU	1295	6,75

Sumber: PPS Desa Panggungharjo, 2009

Bahkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di lingkungan Krapyak Kulon atau di sekitar lingkungan Pesantren Al-Munawwir Krapyak, yakni TPS 44, 45, 46, 47, 54, 55 dan 56, PKNU hanya mengumpulkan 162 suara. Bandingkan dengan suara Partai Demokrat yang berhasil mengumpulkan 300 suara atau unggul hampir 40% dari PKNU.³ Hasil ini selain disebabkan oleh popularitas SBY juga menandakan kemenangan kelompok Yayasan Ali Maksum yang dipimpin oleh KH. Attabiq Ali. Sementara itu, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tidak memperoleh suara yang signifikan, dan Nyai Ida Zainal gagal lolos sebagai Anggota DPRD Propinsi Yogyakarta. Merespon kegagalan tersebut, komunitas pesantren Krapyak lebih mengedepankan alasan yang cenderung apolitik sebagaimana dituturkan KH. Zainal Abidin Munawwir.

“....kegagalan PKNU pada Pemilu 2009 kemarin, karena: Pertama, Allah belum mengizinkan PKNU untuk menang. Kedua, umumnya masyarakat belum mengetahui secara utuh tentang visi dan misi politik yang diusung oleh PKNU. Mereka belum tahu bahwa PKNU adalah Partai Ulama yang memperjuangkan kepentingan umat Islam (Wawancara dengan KH. Zainal Abidin Munawwir, 7 Oktober 2010).

Apapun yang dikatakan oleh KH. Zainal Abidin Munawwir, fakta ini menggambarkan bahwa sikap maupun dukungan politik pesantren pada sebuah partai politik tertentu, tidak selalu paralel dengan dukungan masyarakat yang selama ini berada dalam pengaruh pesantren. Dan secara luas, legitimasi pesantren sebagai sumber moralitas politik menjadi tidak terlalu dihiraukan oleh masyarakat. Hal ini misalnya dapat dicermati pada pernyataan Kepala Duku Krapyak Kulon, Bapak Hunain bahwa

masyarakat saat ini tidak lagi menjadikan sikap politik Kiai dan pesantren sebagai pedoman dalam memilih partai politik. Sebab para kiai dinilai terlalu sibuk dengan aktifitas politiknya sendiri yang sering tidak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat (Wawancara dengan Bapak Hunain, 7 Oktober 2010).

3. Bentuk-Bentuk Keterlibatan Pesantren dalam Politik

Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa keterlibatan pesantren dalam politik mengambil bentuk yang bermacam-macam, sesuai dengan peran yang dimainkan oleh Kiai, Ustadz, Nyai ataupun santri. Dengan demikian kita dapat membuat beberapa model keterlibatan pesantren dalam politik dengan mengamati berbagai proses keterlibatan politik pesantren yang terjadi selama ini (Wawancara dengan Bapak Hunain, 7 Oktober 2010).

Pertama, terlibat secara langsung sebagai praktisi dan aktor politik yang terjun sebagai pengurus dan aktifis partai politik tertentu. Hal ini secara langsung melibatkan elit pesantren, yakni kiai dan keluarganya atau ustadz senior yang memiliki hubungan dengan kiai. Keterlibatan secara langsung memberikan peluang politik yang lebih besar kepada elit pesantren untuk mencapai jabatan politik yang lebih baik. Posisi ini diharapkan memberikan ruang politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pesantren. Karena jabatan-jabatan politik turut menentukan kebijakan dan program-program pembangunan. Kasus terjun langsung dalam politik ini sebagaimana diperlihatkan oleh Nyai Ida Zainal di Pesantren Al-munawwir Krapyak.

Kedua, sebagai kekuatan pendukung partai politik tertentu dengan cara memberikan dukungan dibalik layar. Pesantren menginisiasi berbagai kegiatan keagamaan yang dimanfaatkan oleh partai politik untuk mensosialisasikan visi politiknya. Pada banyak kasus, pesantren menggelar even-event keagamaan yang disponsori oleh kekuatan politik tertentu yang melibatkan masa umat Islam dalam jumlah yang banyak. Hal ini misalnya tercermin pada penyelenggaraan pertemuan kiai yang dilaksanakan di sebuah hotel berbintang di Yogyakarta. Kegiatan bertajuk silaturahmi itu ternyata disponsori oleh Politisi Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang juga menantu Kiai Attabiq Ali Maksum, Pimpinan Yayasan Ali Maksum Krapyak (Wawancara dengan Zuly Qodir, 20 oktober 2010).

Ketiga, sebagai legitimasi politik yang sering dimanifestasikan dalam bentuk restu politik pada partai atau tokoh politik tertentu yang tidak berasal dari lingkungan pesantren. Hal seperti ini bagi banyak praktisi politik dianggap penting. Sebab dalam sistem politik Indonesia yang ideologis dan tradisonal, legitimasi keagamaan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan citra sebagai seorang muslim yang baik, sholeh, serta dekat dengan ulama turut menentukan elektibilitas seorang praktisi politik di hadapan pemilih muslim. Berkaitan dengan itu, Pesantren sering menerima “order” kunjungan politisi, calon anggota legislatif, capres, atau komunitas partai politik tertentu yang sedang berkompetisi. Hal ini dilakukan sebagai proyek pemoleasaan citra diri sebagai seorang muslim yang baik yang dekat dengan komunitas agama atau pesantren. Sebagai contoh pada pemilu Presiden Tahun 2004 semua calon presiden⁴ tercatat pernah berkunjung ke pesantren Al-Munawwir Krapyak untuk meminta restu dan doa dari Pesantren Krapyak. Pada kunjungan Megawati yang saat itu sedang diterpa kontroversi kepemimpinan politik perempuan, justru dimanfaatkan dengan baik oleh tim suksesnya untuk membuktikan bahwa tidak semua pesantren NU menolak calon presiden perempuan. Demikian halnya pada pemilu presiden 2009, meskipun hanya Nyonya Mufida Yusuf Kalla, istri dari Capres Jusuf Kalla yang berkunjung ke Krapyak, namun di Televisi diperlihatkan safari politik dari Capres yang berkunjung ke pesantren lainnya di Pulau Jawa. Semuanya seakan berlomba paling cepat untuk mengunjungi pesantren.

4. Memahami Motif Politik Pesantren

Proses-proses politik yang terjadi di pesantren menunjukkan bahwa keterlibatan pesantren dalam politik didorong oleh motif politik yang beragam. Motif yang dimaksud di sini adalah dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam pesantren, baik yang disadari maupun tidak disadari untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu untuk menjelaskan motif keterlibatan pesantren dalam politik juga bukan sesuatu yang mudah. Di sini kita memasuki ranah perdebatan yang sensitif yakni berusaha menjelaskan berbagai alasan yang mendorong pesantren terlibat dalam politik. Satu hal yang sering kali tidak mau diakui oleh komunitas pesantren. Dibutuhkan suatu analisis yang lebih dalam dan cermat, karena

keterlibatan pesantren dalam politik dipengaruhi berbagai faktor yang saling terkait, baik yang berasal dari kondisi-kondisi internal pesantren maupun tekanan eksternal. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara maupun observasi di Pesantren Krapyak Yogyakarta, maka setidaknya terdapat tiga motif atau alasan mengapa pesantren terlibat dalam politik.

a. *Doktrin Teologis*

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengkaji dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, maka basis argumentasi politik pesantren jelas bersandar pada pemahaman keagamaan yang kuat. Pemahaman tersebut disarikan dari penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah serta paparan ulama-ulama terdahulu yang dijelaskan dalam berbagai kitab klasik (kitab kuning) yang sering dikaji di Pesantren. Umumnya komunitas pesantren memandang bahwa politik merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam. Bernegara mempunyai koherensi dengan beragama yang direfleksikan dari pemikiran bahwa pendirian negara sesuai dengan Ijma ulama adalah hukumnya *fardhu kifayah*. Pandangan ini sejalan dengan kaidah Fiqh yang menyatakan *man la yatimmuh al wajib illah bihi, fahuwa wajib* (jika sesuatu kewajiban tidak dapat sempurna kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarana itu hukumnya wajib). Dalam logika ini bila menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut (salah satunya) adalah negara, maka hukum mendirikan negara juga wajib (*fardu kifayah*). Dalam teori politik Islam, pemahaman seperti ini lebih dikenal dengan paham akomodasionis yang memandang politik sebagai bagian dari ajaran agama yang tidak dapat dilepaspisahkan (Syamsudin, 1993).

Konsekwensi dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa mengelola negara dengan sebaik-baiknya sama hukumnya dengan mendirikan negara. Karena itu, ketika negara telah didirikan tetapi hanya menimbulkan *mudharat*, justru akan bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya negara dalam Islam yakni membentuk masyarakat sejahtera di bawah ampunan Allah SWT. Oleh sebab itu, seperti dituturkan KH. Zainal Abidin Munawwir (Wawancara dengan KH. Zainal Abidin Munawwir, 6 Desember 2010), berpolitik merupakan salah satu kewajiban kifayah umat Islam untuk menegakkan nilai-nilai dan ajaran Islam.

b. *Mobilitas Struktural dan Kontekstualisasi Pesantren*

Politik adalah suatu praktek tentang usaha untuk meraih kekuasaan politik. Sebab menguasai kekuasaan politik memberi ruang kepada kekuatan-kekuatan politik untuk merealisasikan visi, misi dan program-program politik yang akan dilaksanakan. Inilah kenyataan dalam kehidupan politik sejak demokrasi dicanangkan pertama-tama dalam bentuknya yang paling sederhana. Pesantren tentu menyadari fakta ini, sehingga keterlibatan pesantren dalam politik harus diletakkan dalam konteks mobilitas struktural untuk memperjuangkan berbagai nilai, doktrin, semangat, aspirasi, dan kepentingan yang dianut oleh pesantren.

Keberhasilan meraih jabatan publik yang penting sebagai Presiden, Anggota DPR, Gubernur, Bupati atau Walikota diyakini mampu membuka ruang partisipasi bagi pesantren untuk berbuat lebih banyak. Justru bagi sebagian Kiai, ungkapan sebagian kalangan bahwa pesantren hanya meneguhkan dirinya di wilayah kultural dalam sekedar melakukan kerja-kerja kemasyarakatan, merupakan pernyataan yang keliru dan *ahistoris* dan harus dicurigai. Hal ini misalnya diungkap oleh Kiai Miftahul Akhyar, seorang Kiai dari Jawa Timur dalam tulisannya di *Republika*, ia menyatakan,

“Umat Islam, khususnya NU harus pandai menyaring pernyataan yang tampak manis tetapi sebenarnya akan memberangus agar NU dan Islam diluar pemerintahan dan dikuasai orang Islam tetapi tidak mengerti kemauan dan kebutuhan Islam. Justru pernyataan agar Kiai dan NU jangan terlibat politik merupakan usaha dari kelompok sekuler untuk melemahkan Islam” (http://www.republika.co.id/berita/66656/Kiai_NU_tidak_akan_Tinggalkan_Politik. diakses 2 Desember 2010).

Secara lebih luas keterlibatan pesantren dalam politik juga dapat dilihat sebagai upaya pesantren untuk memperluas peran dan sumberdaya yang dimiliki selama ini. Sebab selama beberapa dasawarsa –dibawah tekanan Orde Baru- pesantren hanya diperlakukan sebagai lembaga kultural yang berada di luar struktur kekuasaan politik. Padahal pesantren menyimpan potensi dan pengaruh politik yang besar. Selama ini pesantren hanya dijadikan sebagai objek politik semata, ia sekedar alat politik bagi sebagian Partai Politik yang bisa digerakkan pada momentum pemilu. Namun

setelah proses politik itu usai, pesantren dan komunitasnya sering dilupakan dari hingar bingar politik.

Komunitas pesantren tentu menyadari hal tersebut dan mulai melakukan konsolidasi politik secara sistematis. Komunitas NU yang menguasai ribuan pesantren mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menandai momentum politik baru dimana komunitas pesantren memperluas wilayah dakwah, dari ranah kultural ke ranah struktural. Politik menjadi sarana baru bagi pesantren untuk unjuk peran maupun kontekstualisasi diri. Fenomena ini bisa dilihat sebagai bentuk respon politik pesantren terhadap dinamika eksternal. Apalagi sistem politik pasca reformasi membuka ruang politik yang lebih luas kepada pesantren untuk terlibat dalam usaha-usaha politik menyelesaikan beragam masalah kebangsaan. Maka keterlibatan dalam politik, bagi sebagian komunitas pesantren adalah panggilan sejarah untuk berbuat bagi kemajuan bangsa. Bila sebelumnya pesantren hanya diposisikan sebagai lembaga moral yang terkungkung di menara gading, maka tiba saatnya bagi pesantren melakukan kerja-kerja politik untuk kebaikan kehidupan berbangsa.

Menurut Ahmad Patoni (2007), usaha komunitas pesantren untuk mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuktikan bahwa pesantren mampu melihat efektifitas perjuangan moral pesantren pada level kekuasaan, hanya bisa diwujudkan melalui jalan politik. Melalui partai politik, pesantren meyakini mampu melakukan manuver taktis dalam mewujudkan kebijakan publik yang memihak kepada kepentingan masyarakat. Selain pertimbangan tersebut politik pesantren juga memiliki tujuan yang tidak kalah penting, yaitu memberikan benteng moralitas pada sebuah kehidupan politik yang sehat dan bermoral. Sebab perilaku para politikus diyakini sudah banyak yang menyimpang dari koridor moralitas-keberagamaan. Demi mencapai tujuan dan ambisi politiknya mereka rela melakukan apapun. Kehadiran pesantren diharapkan dapat memberikan sandaran dan perspektif moralitas, sehingga politik akan berjalan sesuai dengan rel kebenaran dan berdasarkan kepada landasan yang benar.

Selain soal mobilitas struktural dan kontekstualisasi diri yang perlu diwujudkan sesuai semangat zaman, pesantren pada dasarnya juga didesak oleh kekuatan politik eksternal untuk terlibat. Fenomena ini misalnya dapat kita saksikan pada Pemilu Presiden 2004, dimana PDIP perjuangan

yang mencalonkan Megawati ingin menguasai massa pesantren dengan mendukung Ketua PDIP Megawati dengan Ketua PBNU Hasyim Muzadi. Pencalonan Hasyim Muzadi diharapkan dapat mewakili aspirasi umat Islam khususnya NU sekaligus mendorong dukungan politik dari komunitas pesantren yang diakui jumlahnya sangat besar. Meskipun eksperimen politik ini tidak berhasil memenangkan pemilu, namun kasus ini menunjukkan bahwa alasan keterlibatan pesantren dalam politik juga karena desakan eksternal yang kuat. Apalagi bila desakan tersebut juga dibarengi dengan tawaran-tawaran ekonomi untuk kepentingan pembangunan pesantren.

c. *Kepentingan Pragmatis-Ekonomi.*

Liberalisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan yang semakin masif di Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak terelakkan juga menimpa pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang dikelola secara swadaya oleh kiai dan masyarakat. Biaya operasional pendidikan yang semakin tinggi berdampak langsung pada kondisi finansial pesantren. Dengan manajemen keuangan yang sangat sederhana, pesantren harus memperhatikan kemampuan pendanaan yang dimiliki. Dalam sejarah perkembangan pesantren, beberapa pesantren 'terpaksa' gulung tikar karena ketidakmampuan pembiayaan dalam menutupi biaya operasional pendidikan yang dijalankan. Pendapatan yang diperoleh dari iuran santri dan infak donatur yang tidak tetap, merupakan persoalan yang membutuhkan solusi yang tepat (Irwan Abdullah, 2008;3).

Situasi ini sering mendorong para kiai dan pengelola pesantren untuk memikirkan cara-cara lain yang mudah dan efektif untuk memperoleh bantuan yang bisa digunakan untuk pembangunan pesantren. Di beberapa tempat pengelola pesantren berhasil memperoleh bantuan keuangan secara reguler dari pemerintah daerah atau pihak Kementerian Agama. Bahkan sebagian mendapat bantuan fisik berupa pembangunan infrastruktur pesantren. Bantuan-bantuan itu biasanya tidak gratis, karena pihak pemberi bantuan menuntut hal-hal tertentu. Dalam kasus di Pesantren Al-Munawwir Krapyak, tawaran untuk menerima bantuan secara reguler dari pemerintah diringi dengan permintaan untuk mengakomodasi kurikulum yang disediakan Kementerian Agama atau Kementerian

Pendidikan Nasional. Pesantren Al-Munawwir menyikapi secara kreatif dengan mendirikan pesantren baru dalam lingkungan pesantren Krapyak yang mengelola Pesantren Ali Maksum dengan basis pengetahuan moderen. Sementara Pesantren Al-Munawwir tetap bertahan sebagai pesantren salafi yang mengkhususkan diri dalam pengajaran ilmu agama (Wawancara dengan Silahuddin, 23 November 2009).

Selain menempuh cara tersebut, tidak jarang pesantren menempuh jalan pintas dengan melibatkan diri dalam politik kekuasaan yang dianggap cara yang cepat dan efektif untuk membangun jaringan donasi baru. Dengan pengaruh sosial dan politik yang kuat di masyarakat, pesantren dapat melakukan bargaining politik dengan para politisi yang memerlukan dukungan politik pesantren, dari sekedar dukungan moril dan pembentukan citra hingga mobilisasi suara rakyat dalam pemilu, pilpres atau pilkada. Meskipun secara terbuka pihak pengelola pesantren sering membantah melakukan bargaining politik dengan kompensasi ekonomi, namun fakta tentang bantuan yang diterima juga diakui. Di Pesantren Al-Munawwir misalnya, donasi dari kelompok politik banyak diterima pada era kepemimpinan KH. Ali Maksum yang juga seorang politisi NU. Demikian pula halnya pada kepemimpinan KH. Zainal Abidin Munawwir saat ini, pesantren juga menerima bantuan, meskipun diakui tidak terlalu banyak.

Salah satu tokoh politik yang disebut banyak membantu Pesantren Al-Munawwir Krapyak adalah Alwi Shihab. Alwi Shihab adalah Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa periode 1999-2004 sebelum dilengserkan oleh Gus Dur karena dianggap membangkang. Alwi Shihab juga merupakan Menteri Luar Negeri pada era Gus Dur dan Menkokesra pada kabinet SBY. Dukungan elit PKB kepada pesantren Krapyak dapat dimaklumi, karena Pesantren Al-Munawwir turut merintis pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan Pesantren Al-Munawwir secara terbuka turut mengkampanyekan PKB pada pemilu 1999 dan 2004. Selain memberikan bantuan secara langsung, elit PKB yang dipimpin Alwi Shihab juga memfasilitasi bantuan dari donatur-donatur utama di Timur Tengah untuk pembangunan masjid dan beberapa gedung baru yang cukup megah. Pola hubungan seperti ini acap kali dibantah oleh pesantren sebagai bermotif politik. Namun kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu 2004

di wilayah Krpyak dan sekitarnya membuktikan bahwa relasi ekonomi politik seperti ini sering terjadi di pesantren. Tampaknya dukungan-dukungan politik itu paralel dengan bantuan ekonomi yang diterima pesantren.

5. Implikasi Politik Pesantren; dari Pragmatisme Politik Menuju Resistensi Sosial.

Pro dan kontra yang mengiringi keterlibatan sebagian pesantren dalam politik praktis pada dasarnya merupakan wujud ekspektasi umat terhadap posisi pesantren yang sangat terhormat. Sejak lama, umat Islam di Indonesia menempatkan pesantren sebagai sumber rujukan moralitas keagamaan. Para Kiai adalah panutan umat yang fatwa serta nasihatnya menjadi pegangan masyarakat dalam kehidupan. Bahkan menurut Zamakhsyari Dhofier sebagaimana dikutip Koirudin (2005; 144), peran Kiai merupakan faktor determinan kebijakan sosial, dan pengambilan keputusan-keputusan penting menyangkut keberhasilan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pesantren merupakan pilar dari bagaimana nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai keagamaan dijalankan di tengah masyarakat.

Persoalan mengemuka ketika pesantren yang merupakan reverensi nilai-nilai keagamaan itu tertarik kedalam dunia politik praktis dengan berbagai alasan yang diyakininya. Di sinilah sebagian orang menilai sebagai bentuk penyimpangan terhadap peran sosial yang selama ini dimainkan pesantren. Apalagi keterlibatan pesantren dalam politik sering disertai aktifitas-aktifitas partisan sesuai tuntutan kepentingan politik yang terkadang tidak sejalan dengan logika masyarakat umum. Di sini, Kiai dan pesantren tidak dapat mempertahankan legitimasi keagamaanya karena masyarakat telah meragukan otoritas dan ketulusan yang dimiliki. Yakni apakah pesantren sedang berbicara atas dasar kepentingan agama dan kepentingan umat atau atas dasar kepentingan partai politik atau politisi yang didukung pesantren.

Berbagai fenomena politik yang berkaitan dengan dukung mendukung politik di dunia pesantren, menunjukkan bahwa aktifitas politik pesantren ternyata memiliki implikasi yang sangat luas. Analisis terhadap hal ini bisa dimulai dari perdebatan doktrinal keagamaan tentang hubungan agama

dan negara di Indonesia, hingga dampak-dampak material yang mungkin diperoleh oleh pesantren sehingga memperkuat kesimpulan tentang praktik pragmatis transaksional oleh pihak pesantren. Dengan demikian pesantren terlibat politik bukanlah sebuah frase yang sederhana, tetapi memiliki implikasi yang luas dan mesti dianalisis secara hati-hati.

a. Delegitimasi Peran Pesantren

Keterlibatan pesantren dalam politik membawa implikasi terhadap eksistensi pesantren di satu sisi dan terhadap kekuatan politik yang didukung oleh pesantren. Bagi pesantren yang kiainya terlampaui sibuk mengurus politik akan berkurang waktu dan perhatiannya dalam mengurus pesantren. Hal ini disebabkan aktifitas politik membuat para kiai harus sering keluar untuk koordinasi, rapat dan kegiatan politik lainnya. Di Pesantren Al-Munawwir Krapyak aktifitas politik dari Nyai Ida Zainal selama pemilu 2009, membuat pengelolaan pesantren putri yang dipimpinnya cukup terbengkalai. Hal inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh Kiai atau pimpinan pesantren bila mereka ingin terlibat dalam politik.

Banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena Kiai atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Pesantren yang terlampaui aktif dalam peran politiknya (*political oriented*) sangat mungkin akan ditinggal oleh santrinya. Sebab orang tua santri yang kritis akan lebih memilih pesantren yang lebih menjaga independensinya terhadap politik praktis. Pada titik ini, dapat disimak bahwa masyarakat yang sebelumnya sangat menghormati pesantren dan selalu mengikuti anjuran dan arahan pesantren mempunyai dasar untuk menentang legitimasi fatwa pesantren, khususnya dalam isu-isu sosial dan politik, terutama dalam kasus pemilu. Dalam konteks penentangan atau penolakan ini, anjuran pesantren untuk memilih sebuah partai politik tertentu juga sering membuat umat terpecah dalam politik dukung mendukung yang tidak kondusif. Perpecahan suara yang sering diiringi dengan konflik-konflik sosial, membuktikan bahwa aktifitas politik praktis yang dilakoni pesantren lebih banyak menimbulkan mudharat.

Sementara itu, independensi pesantren yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam menjaga nilai-nilai dan moralitas masyarakat akan semakin sulit ditegakkan. Bahkan banyak pesantren yang masuk dalam lingkaran kekuasaan politik, secara sadar tunduk pada keputusan-kepu-

tusan politik. Mereka harus turut menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintah, meskipun hal tersebut diyakini merugikan kepentingan pesantren. Eksistensi sejumlah pesantren salafi kini sedang dipertaruhkan di hadapan kebijakan pendidikan nasional yang menginginkan perlunya sejumlah penambahan kurikulum pendidikan moderen dalam kurikulum pesantren yang dianggap tradisional dan kurang prospektif.

Banyak pesantren secara sadar mengikuti kebijakan tersebut, tentu disertai argumentasi bahwa masyarakat juga telah berubah. Sehingga penting bagi pesantren untuk bisa merespon perubahan tersebut dengan menyesuaikan kurikulum dan sistem pendidikan pesantren dengan kebutuhan masyarakat. Ada pula pesantren, seperti Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang melakukan langkah kreatif dengan menyelenggarakan unit pendidikan khusus yang mengikuti sistem pendidikan nasional. Sejak lima tahun lalu Yayasan Pesantren Krapyak mendirikan SMK Mekanika yang memberikan skill teknik kepada para santrinya. Para santri tidak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan di SMK tersebut, hanya mereka yang ingin menambah pengetahuan saja yang menambah waktu belajar di sana.

b. Menguatnya Politik Pragmatisme-transaksional

Implikasi lain dari keterlibatan pesantren dalam politik juga terlihat pada perubahan sarana fisik pesantren. Hal ini membenarkan penjelasan teori ekonomi politik *deterministic* yang memandang bahwa interaksi-interaksi politik selalu bermotif ekonomi (Stanyland, 2005:9). Pesantren menjadikan pengaruh dan legitimasi sosial keagamaan yang dimiliki sebagai bahan tawar menawar dengan kelompok politik (*interest group*). Bantuan-bantuan material kerap kali datang ke pesantren sebagai buah dari konsensus politik yang dilakukan itu. Hal ini memunculkan rumor tentang politik uang yang sering diplesetkan menjadi *high cost politics*. Transaksi uang dengan suara dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Transaksi langsung mengandung pengertian, transaksi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan langsung dengan memberikan uang dengan janji suara yang akan disalurkan melalui pesantren. Sedangkan transaksi tidak langsung dapat berupa benda atau apa saja yang dapat dipertukarkan dengan kepentingan kiai, maupun

“pembangunan pesantren”. Alhasil posisi politik pesantren menjadi sangat pragmatis dan transaksional. Suatu praktik politik yang sangat tidak sehat dalam pembangunan demokrasi.

Pada pemilu 1999 dan Pemilu 2004, hampir semua pesantren NU termasuk Pesantren Al-Munawwir Krapyak mendukung penuh Partai Kebangkitan Bangsa. Dukungan tersebut mendatangkan banyak bantuan material. Pembangunan gedung pendidikan pesantren setinggi dua lantai yang menelan biaya miliaran rupiah itu, diakui sebagian atas urungan Alwi Sihab, Ketua PKB 1999-2004 (Wawancara dengan Solahudin, 20 Oktober 2010). Ketua PKB dan Menkokesra di paroh pertama kabinet SBY itu juga memfasilitasi berbagai bantuan yang berasal dari para donatur di Timur Tengah.

Disini terjadi perkawinan kepentingan, antara kelompok kepentingan (*interest group*) seperti partai politik dengan kepentingan pesantren sebagai kelompok sasaran (*target group*). Adanya perkawinan kepentingan tersebut menurut Koirudin (2005:105) memunculkan konsekwensi logis terjadinya pertukaran, lazimnya di pasar menggunakan uang sebagai alat transaksinya. Politisasi pesantren, santri dan kiai menjadi analog terhadap “pazarisasi pesantren”. Pesantren menjadi pasar layaknya tempat pertukaran antara suara, dengan uang sebagai alat transaksinya. Sebagai *target group* pesantren tidak mau lagi dibodohi *interest group* yang biasanya memerlukan pesantren pada momentum politik pemilu atau pilkada semata, dan setelah pemilu berakhir pesantren sering dilupakan.

Politik kompensasi ekonomi ini menarik untuk diamati karena di satu sisi bermanfaat untuk melanjutkan pembangunan berbagai sarana dan prasarana pesantren, yang juga berarti menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi kepentingan keuangan pesantren. Tetapi pada sisi yang lain menyeret pesantren pada pusaran politik pragmatis-transaksional yang tidak sehat dan membahayakan, karena selalu mengkondisikan politik dengan uang. Terjadilah apa yang disebut “kapitalisasi pesantren” dalam transaksi-transaksi politik dewasa ini. Suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, sebab akan merusak integritas moral, legitimasi dan eksistensi pesantren itu sendiri. Serta secara luas akan melemahkan posisi pesantren sebagai kekuatan *civil society* yang diharapkan mampu berhadapan *vis a vis* dengan kekuasaan.

c. *Resistensi Masyarakat Kepada Pesantren*

Secara tradisional masyarakat memandang pesantren sebagai sumber legitimasi moral. Kiai dan pesantren adalah panutan dan pembimbing umat. Sebagai sumber moral dan panutan umat pesantren diharapkan menjadi teladan dalam mempraktekkan Islam ke dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu kiai dan komunitas pesantren tentu harus menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak kewibawaan dan integritas, semisal keterlibatan pesantren dalam politik praktis. Memang tidak selamanya politik praktis sebagai “barang kotor”, akan tetapi pemahaman masyarakat umum telah menempatkan politik sebagai media persaingan perebutan kekuasaan. Para Kiai pesantren misalnya akan menerima imbas dari persepsi umum ini. Konsekwensinya, predikat *uswah hasanah* pesantren tentu akan tercerabut legitimasi sosialnya. Petuah, nasihat maupun fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai akan dibaca dalam konteks politik.

Sejauh ini ada beberapa bentuk resistensi masyarakat terhadap keterlibatan politik pesantren. *Pertama*, masyarakat menilai pesantren yang terlalu politis akan tercerabut dari fungsi-fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Bahkan secara mencolok sebagian orang tua yang kritis menolak memasukkan anaknya ke dalam pesantren yang terlalu terlibat politik (Patoni, 2007). Fenomena ini juga tampak di Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang mengalami penurunan jumlah santri secara signifikan.

Kedua, resistensi yang paling nyata tentu adalah pembangkangan politik yang dilakukan oleh masyarakat untuk tidak memilih partai yang didukung secara khusus oleh pesantren. Hal ini tentu menarik karena kontradiktif dengan dengan temuan Bolland (1982) bahwa masyarakat muslim tradisioal selalu mendukung sikap politik yang dianut oleh tokoh agama atau pesantren. Mungkin fenomena pesantren dan politik yang terjadi di Pesantren Al-Munawwir Krapyak dapat membantu menjelaskan bahwa saat ini sudah terjadi pergeseran sikap politik pemilih muslim, dari tipologi ideologis dan kharismatis ke sikap politik yang lebih rasional. Seiring demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin mampu membedakan sikap pesantren sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati dan disurituladani. Serta sikap pesantren yang sebetulnya adalah murni politik kepentingan yang tidak berkaitan dengan

ajaran keagamaan sehingga tidak mesti ditaati.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pesantren di ranah politik yang semakin marak akhir-akhir ini, secara nyata telah menimbulkan berbagai implikasi yang cukup signifikan. *Pertama*, bahwa keterlibatan pesantren dalam politik secara nyata telah mendeligitmasi peran pesantren sebagai otoritas moral dan reverensi keagamaan. Banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena Kiai atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Kondisi ini membuat masyarakat memandang pesantren tidak lagi objektif dalam sikap-sikap politiknya, karena cenderung menguntungkan kelompok politik tertentu sehingga terjadi delegetimasi peran pesantren. *Kedua*, Pesantren telah turut mengukuhkan politik pragmatis-transasional, karena pesantren telah menjadikan politik sebagai ajang untuk mempertukarkan dukungan politik dengan kompensasi-kompensasi materi yang diterima. Bias politik yang terjadi dipesantren ini tentu akan semakin menjauhkan pesantren dari masyarakat. Setidaknya hal ini mulai terasa belakangan ini, ketika masyarakat mulai menyoroti sikap politik pesantren yang dianggap hanya merusak independensi pesantren dan memecah umat kedalam politik partisan. *Ketiga*, terjadi resistensi masyarakat atas sikap politik pesantren. Hal ini secara nyata dapat disaksikan dalam sikap politik masyarakat yang seakan-akan membangkang terhadap pilihan politik pesantren. Seiring demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin mampu membedakan sikap pesantren sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati dan disuritauladani. Serta sikap pesantren yang sebetulnya adalah murni politik kepentingan yang tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak mesti ditaati.

Disini terlihat bahwa pesantren perlu hati-hati dalam menentukan sikap politiknya. Sebab keterlibatan politik pesantren memiliki dampak yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Apalagi bila kesibukan politik telah melalaikan Kiai maupun pengelola pesantren dari urusan pendidikan di pesantren. Mungkin di masa depan pesantren perlu melakukan revitalisasi peran politik yang lebih sesuai dengan semangat zaman dan keinginan masyarakat yang sudah semakin rasional. Sebab

politik pesantren pada dasarnya bukan politik kekuasaan tetapi politik kerakyatan yang bergerak pada ranah kultural.

(FOOTNOTES)

- ¹ Studi tentang pesantren diantaranya adalah Zamakhsyari Dhovier (1980), Hiroko Horikoshi (1987), Endang Tirmizy (2004), Khoirudin (2005) dan Ahmad Patoni (2007). Namun berbagai penelitian tersebut belum menunjukkan implikasi keterlibatan pesantren dalam politik pada satu dasawarsa terakhir.
- ² Data tentang sejarah, Perkembangan dan Manajemen Pendidikan di Pesantren Al-Munawwir Krapyak, diolah dari Buku Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak Yogyakarta (Penerbit; Pengurus Pusat Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak Yogyakarta, Cet. Kedua, 2001)
- ³ Data ini diolah dari buku Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota, PPS Desa Panggunharjo.
- ⁴ Calon Presiden pada Pemilu 2004 adalah 1). Pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid, 2) pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi, 3) Pasangan Amien Rais dan Siswono Yudohusodo, 4) Pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusf Kalla, dan 5) Pasangan Hamzah Has dan Agum Gumilar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, ddk. 2008. *Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, Yogyakarta; Sekolah Pascasarjana UGM bekerjasama Pustaka Pelajar.
- Anonymous. 2009. *Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Prop. DPRD Kab dan Kota*, Yogyakarta; PPS Desa Panggun Harjo Kabupaten Bantul.
- Anonymous. 2009. *Rencana Pembangunan Pemukiman (RPP) Desa Panggunharjo 2009-2014 Kec. Sewu Bantul Yogyakarta*.
- Bolland, BJ. 1982. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague; Martinus Nijhoff.
- Efendi, Bachtiar. 1996. *Islam dan Negara*, Jakarta; Paramadina.

- 2001. *Teologi Baru Politik Islam*, Yogyakarta: Galang Press
- Deliarnov. 2003. *Ekonomi Politik*, Jakarta: Airlangga.
- Departemen Agama RI. 2003a. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta; Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Dhovier, Zamakhsyari. 1990. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta; LP3S
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta. Pustaka Jaya.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta; LP3S.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta; Gray Media Pratama.
- Khoirudin. 2005. *Politik Kiai*, Yogyakarta, Averroes Press.
- Marsh, David dan Gerry Stocker (ed). 2002. *Theory and Methods in Political Science*, New York: Palgraf, MacMillan.
- Patoni, Ahmad. 2007. *Peran Kiai Pesantren dalam Politik*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Staniland, Martin. 2003. *What is Political Economy? A Study of Social Theory and Underdevelopment*, dalam Deliarnov. 2005. *Ekonomi Politik*, Jakarta; Airlangga.
- Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta; LP3S.
- Surbakti, Ramlan. 1984. *Perbandingan Sistem Politik*, Surabaya; Mecphiso Grafika.
- Syamsuddin, Din. 1993, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam*, Jurnal Ulumul Qura'an No. 2 Vol. IV.
- Turmuzy, Endang. 2004, *Kiai dan Perselingkuhan Kekuasaan*, Yogyakarta; LKiS.